

Kartini dan Solidaritas Hari ini

MENJELANG 21 April, narasi tentang Kartini selalu diproduksi dengan berbagai perspektif. Kumpulan catatan kegelisahan yang ia tulis dalam surat-surat, dapat berulang-ulang kita baca dalam buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Seperti Kartini ketika itu, dengan versi berbeda, rakyat Indonesia saat ini tengah melawan kondisi penuh ketidakpastian, kegelisahan, dan terjepit.

Bagaimana tidak, 21 April 2020 ini suasana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia begitu berbeda. Situasi pandemi ini mengantarkan pada banyak ketidakpastian, kompleks, dan tanpa bermaksud berlebih-lebihan, bayang-bayang pemutusan hubungan kerja, pekerja yang dirumahkan, keriang dalam suasana sekolah yang meredup, kemiskinan, dan sederet persoalan sosial lainnya.

Narasi Kartini

Dalam narasi-narasi sejarah yang telah dituliskan, Kartini hidup dalam keadaan politik kolonial yang represif. Ia begitu bersemangat untuk mengangkat derajat perempuan-perempuan pribumi—melontarkan kritik pedas pada orang-orang kolonial.

Ia sebenarnya tak berdaya, pun tak memiliki kekuasaan. Namun, ia melawan ketakutannya sendiri. Ia ingin agar kelak perempuan-pe-

empuan dari bangsanya menjadi perempuan terdidik.

Kartini mencoba progresif dalam kecemasannya, yang membuatnya waras adalah adanya kesadaran akan "tanggung jawab sosial" meski dalam polemiknya yang lain ia sebut sebagai kesadaran akan tugas dalam *reconstructive arbeid*, kerja pembangunan—sebuah kesadaran tertinggi dari manusia yang terjajah.

Kini pengalaman hidup Kartini tak harus terimajinasi dalam bentuk glorifikasi. Dalam situasi pandemik ini agaknya kita perlu bergeser ke arah lain, yakni berangkat dari dan di dalam pengalaman antarmanusia, kepedulian pada masyarakat yang hidup dalam kesulitan dan ketertindasan secara struktural. Narasi Kartini hari ini sebuah miniatur perjuangan hidup manusia yang mencapai puncak kesadaran kultural dalam bentuk solidaritas nasional.

Solidaritas

Mengapa solidaritas perempuan? Apakah ini dikotomi bahwa ada juga solidaritas laki-laki? Tentu tidak sesederhana itu. Karena perta-

nyaan perempuan adalah pertanyaan politik. Sejarah pengetahuan telah membisukan pertanyaan itu karena sifatnya subversif; menuntut transformasi sosial.

Dalam perjalanannya, narasi tentang perempuan menghasilkan cara berpikir baru dalam melihat ketidakadilan dalam masyarakat.

Dalam Buku yang ditulis oleh Sheila Rowbotham berjudul *Dreamers of A New Day: Women Who Invented the Twentieth Century*. Sheila Rowbotham, menyajikan narasi sejarah alternatif yang menunjukkan, dunia (juga) diubah oleh perempuan.

Banyak kemajuan yang kita rasakan dan nikmati hingga saat ini merupakan mimpi dan hasil perjuangan para perempuan abad XX, yang disebut oleh Rowbotham sebagai *dreamers of a new day*. Bahwa Perempuan-perempuan yang "menemukan" abad XX adalah yang memiliki mimpi untuk mengubah wajah kehidupan menjadi lebih adil dan setara.

Akan tetapi, "paradigma alternatif" yang dihasilkan oleh produksi pengetahuan perempuan, oleh perempuan, biasanya akan mengalami

hambatan ganda. Pertama, upaya itu akan dianggap sebagai "keluar jalur". Kedua, ia akan dituduh menyeragamkan pengalaman yang berbeda di antara perempuan dalam sejarah dan ruang sosial-budaya berbeda.

Kondisi ini terutama akan dirasakan dalam kehidupan masyarakat, terutama perempuan yang mengambil perannya di ruang-ruang publik. Studi tentang perempuan hari ini telah melahirkan perspektif baru dalam mengkritisi fenomena keadilan, hukum, dan kebijakan publik.

Ruang-ruang perjuangan perempuan telah menelitik fungsi hukum dan kebijakan publik yang kedap sosial. Sisi lainnya melihat esensi keadilan sebagai problem yang tidak hanya menyangkut distribusi kemakmuran.

Perempuan

Pascareformasi membawa angin segar bagi gerakan politik perempuan, yakni terbukanya ruang-ruang baru bagi perempuan untuk kembali berpartisipasi dalam politik.

Namun, perjuangan perempuan sampai dengan saat ini belum menemui titik terang. Dalam tataran praksis, harapan-harapan perempuan Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan mengalami jalan-jalan terjal. Hal itu berhubungan dengan trauma terhadap sejarah politik Indonesia. Selain itu, perempuan se-

lama ini kesulitan untuk keluar dari domestikasi tugas dan perannya dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Kenyataan tersebut juga merupakan kegelisahan Hannah Arendt. Ia mereduksi fakta-fakta sosial tersebut dalam sebuah teori politik. Menurut dia, manusia secara fundamental adalah egaliter.

Semua manusia memiliki kemampuan untuk memulai dan mengatur semua peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Melalui kemampuan ini sesungguhnya perempuan Indonesia hari ini dapat terus bergerak dan mendefinisikan dirinya di ruang publik, karena manusia memiliki kemampuan memilih kondisi yang setara.

Bahwa penindasan perempuan, eksploitasi, dan tekanan sosial yang masih terjadi hingga hari ini, bukanlah ciri khusus dari suatu masyarakat atau negara-negara dunia ketiga saja. Semuanya, bagian integral dari sistem politik, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh besar di hampir seluruh dunia.

Akhirnya, perjuangan perempuan Indonesia tak hanya dipahami sebagai narasi tunggal. Perjuangan perempuan Indonesia hari ini seyogianya diselesaikan dengan pemihakan pada kelompok lemah, rentan, dan marginal. Sebuah politik keberpihakan dan solidaritas yang belum tuntas dieja Kartini di masanya.***

Dian Andriasari

Dosen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unisba

